

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu setiap warga negara indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum. Agar kehidupan bangsa indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Segala tingkah laku yang diperbuat oleh tingkah laku manusia pastilah harus berasaskan hukum dan ketentuan yang berlaku saat ini. Pemerintah dalam melakukan seluruh warganya akan selalu berbuat adil. Adil dalam arti memperoleh hak yang seimbang dengan melaksanakan seluruh kewajibannya.

Setiap manusia menyandang kewajiban yang sudah diatur dan harus dipatuhinya. Sebaliknya juga manusia pasti mempunyai hak-hak yang dimiliki sejak ia dilahirkan. Dari berbagai macam hak yang melekat pada diri manusia itu telah diatur dan ditentukan pula peraturan yang bersangkutan dengan hak-hak tersebut. Dengan demikian manusia dihadapkan dengan kewajiban yang harus yang dipenuhinya mereka juga harus memperjuangkan hak-hak mereka dewasa ini. Pemerintah

memberikan peluang untuk setiap warga negaranya agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak dan kepentingannya tentu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengikatnya.

Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia seringkali tidak dapat menghindari dari yang namanya konflik atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan.

Dalam hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut.<sup>1</sup> Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya “*eigenrichting*” (bertindak sendiri untuk mendapatkan haknya).

Tuntutan hak ada dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dengan yang lebih dikenal gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dan tidak dapat menyelesaikann sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara perdamaian, maka pihak yang bersangkutan akan menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, hal. 2

Pihak yang bersengketa tersebut untuk memperjuangkan haknya yang dirugikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam memperjuangkan hak-haknya ada dua macam upaya hukum.

Dalam hukum acara perdata upaya hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>2</sup>

Tidaklah mungkin rasanya suatu putusan hakim itu adalah mutlak benar dan tidak mustahil pula akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan dikemudian hari. Hal itu sangat mungkin terjadi, bilamana pihak ketiga merasa hak-hak serta kepentingannya dirugikan atau dilanggar dengan adanya putusan tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri.

Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga disini merupakan pihak luar dari pokok perkara utamanya. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya.

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hal 142

Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) ini dimaksudkan untuk mempertahankan obyek sita jaminan yang menjadi hak miliknya yang berupa tanah, agar tidak berpindah tangan ke pihak lain atau ke tangan penggugat. Yang putusan sebelumnya dimenangkan penggugat dan dikabulkannya sita jaminan atas obyek milik pelawan oleh hakim.

Perlawanan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dan tidak akan menghambat dimulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau pengadilan memberiperintah untuk menangguhkan pelaksanaan.

Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam perlawanan, disebut terlawan penyita dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah : <sup>3</sup>

1. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.
2. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
3. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yaang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang diawali dengan gugatan pasti akan menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang

---

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 169

harus segera diselesaikan dan diputus berdasarkan dalil yang benar tentunya. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah salah satu upaya hukum luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang mana pelawan harus mengetahui alasannya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke meja hijau.

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memberikan putusan haruslah berdasarkan dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang benar adanya. Tetapi, apabila pelawan tidak puas terhadap putusan hakim pelawan dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi. Agar pelawan bisa mendapatkan lagi apa yang menjadi hak-haknya. Untuk itu pelawan harus benar-benar membuktikan gugatan perlawanannya agar perlawanan pelawan itu dianggap benar oleh hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Maka penulis ingin mengangkat swerta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: “ **PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) “.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti, yang mana rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang akan diteliti. Sehingga akan mudah dalam melakukan penelitian dan sesuai dengan target yang akan diinginkan. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang diajukan oleh pihak ketiga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yang menjadikan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh pihak ketiga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis

Dengan ditulisnya ini, dapat menambah wacana serta cakrawala ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri Surakarta tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Bagi masyarakat

dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan jawaban untuk membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat khususnya yang menyangkut tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan khususnya tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yang artinya adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>5</sup> Sehingga dapat diketahui bagaimana perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan surakarta.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata.

---

<sup>4</sup> Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono. 2004. *Metode Penelitian Hukum* .Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta . hal 3

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, hal. 12



### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan :

- 1) Bahan hukum primer :

- a) KUH Perdata
- b) Yurisprudensi
- c) HIR
- d) Rbg

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang

serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian tersebut.

penelitian yang penulis akan lakukan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan,

wawancara, bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku-buku dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahannya dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

### **G. Sitematika Skripsi**

Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi. Dengan demikian dapat diketahui kaitan-kaitan yang ada dalam pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Metode Analisis Data
- G. Sistematika Skripsi

#### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan
  2. Macam-Macam Sita Jaminan
  3. Fungsi Sita Jaminan
- B. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)
  2. Macam-macam Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)
  3. Prosedur Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)
  4. Hubungan antara sita jaminan terhadap pihak ketiga.
- C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata.
1. Pengertian Sengketa.
  2. Menyusun Surat Gugatan Dan Pengajuan Gugatan.
  3. Pemanggilan Para Pihak.
  4. Pemeriksaan Perkara.
  5. Pembuktian.
  6. Putusan.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Apa yang menjadi alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukan oleh pihak ketiga?

#### B. Pembahasan

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

#### Daftar Pustaka

#### Lampiran